



Judul : Parlemen Dunia buat aturan kesehatan nasional
Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : _

Parlemen Dunia buat Aturan Kesehatan Nasional

IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan untuk membuat hukum dan pemerintah butuh dukungan parlemen untuk mengatasi pandemi.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

SIDANG Inter-Parliamentary Union (IPU) akan merilis buku pegangan untuk parlemen mengenai peraturan kesehatan internasional. Buku itu dapat menjadi alat bagi para anggota parlemen membuat kebijakan dari segi kesiapan kesehatan.

"Peluncuran buku pegangan ini adalah satu hal. Namun, lebih penting bagi kita untuk meningkatkan upaya kolektif kita. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan tindak lanjut implementasi dari upaya bersama kita," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Diskusi Panel WHO di sela-sela 144th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, kemarin.

Terkait peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis di tengah pandemi yang melanda dunia, Puan mengatakan parlemen dapat mendukung dari kebijakan legislasi, penganggaran, pengawasan, dan perwakilan.

Ketua DPR menyebut pandemi mencerminkan kelemahan dan kurangnya kesiapan dunia. "Saat kita dihadapkan dengan ancaman, risiko, dan kerentanan, kita menyadari urgensi untuk pendekatan semua bahaya, multisektoral,

dan terkoordinasi untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan," ungkap Puan.

Ia mengajak anggota parlemen dunia agar membangun peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kesehatan nasional dengan memperhatikan responsif gender dan sensitif terhadap kelompok rentan.

"Kita harus bekerja sama dengan pemerintah memastikan kebijakan dan infrastruktur memadai dalam berbagai masalah," tutur Puan.

Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang hadir secara virtual mengatakan covid-19 mengganggu hal-hal fundamental di banyak negara. Ia pun menilai kurangnya solidaritas antarnegara untuk saling membantu.

Untuk itu, WHO membuat buku panduan untuk parlemen. Hal itu bertujuan agar parlemen bisa membantu pemerintah di negaranya masing-masing dalam penanganan pandemi.

Sementara itu, Sekjen IPU Martin Chungong menyebut buku panduan dari WHO akan memperkuat persiapan parlemen. Itu karena, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan parlemen dalam menghadapi pandemi.

"IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan untuk membuat hukum dan pemerintah butuh dukungan parlemen untuk

mengatasi pandemi," ucap Chungong.

Pengalaman

Parlemen Korea Selatan berbagi pengalaman dengan Puan terkait pemindahan ibu kota. Seperti diketahui, negeri yang terkenal dengan musik *K-pop* itu secara *de facto* memindahkan administrasi pemerintahan ke Sejong meskipun ibu kota negaranya tetap Seoul. Dalam pertemuan bilateral itu, Puan menyampaikan kedua negara saling bertukar pikiran karena Indonesia berencana memindahkan ibu kota negara (IKN) Jakarta ke Penajam Paser dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

"Korea pernah memindahkan ibu kota administrasi, ibu kota negara tetap di Seoul, namun administrasinya dipindahkan ke Sejong. Itu yang mereka tawarkan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Di sana ada banyak pemindahan tempat pemerintahan dan lembaga yang saat ini sedang berjalan," tutur Puan.

Meskipun singkat, Puan mengatakan Indonesia mendapatkan banyak masukan. Pemindahan ibu kota, ujarnya, harus dilakukan dengan strategi dan pemetaan yang kuat serta mendapatkan dukungan politik secara menyeluruh. Pembangunannya, terang Puan, tidak bisa dilakukan secara cepat, tetapi berkesinambungan. (P-5)